

## ABSTRAK

Pemerintah pada periode Presiden Joko Widodo (2014-saat ini) sangat memprioritaskan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan sarana prasana Indonesia. Hal tersebut dianggap penting dikarenakan masih tingginya ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Indonesia. Hal yang menjadi perhatian adalah usaha pembangunan tersebut ditopang oleh peningkatan utang yang signifikan, dibandingkan dengan pemerintahan periode sebelumnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah justru langkah yang diambil pemerintah saat ini justru akan memberatkan kondisi fiskal Indonesia di masa yang akan datang? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi *sustainability* fiskal Indonesia di masa yang akan datang, apakah *solvable* terhadap utang atau tidak lalu apakah terdapat perbedaan tingkat solvabilitas karena adanya perubahan rezim pemerintahan. Dengan menggunakan metode estimasi *Markov Switching Model* dan data periode 2010-2018 secara kuartalan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi fiskal *sustainability* di jangka panjang dikarenakan kondisi fiskal Indonesia tidak *solvable* terhadap utang yang diambil oleh pemerintah dikarenakan Produk Domestik Bruto yang diporksikan dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sisi perpajakan, justru tidak berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas pemerintah. Di sisi lain, risiko dari pergerakan nilai tukar tidak berpengaruh buruk terhadap solvabilitas pemerintah sehingga dapat dikatakan usaha pemerintah untuk mengurangi tekanan dari risiko utang luar negeri adalah efektif. Secara lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi fiskal tetap tidak *solvable* di setiap rezim pemerintahan.

Kata Kunci: Rezim Pemerintahan, *Fiscal Sustainability*, Tingkat Solvabilitas, *Markov Switching Model*